

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan</i>					
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Literasi Keuangan Konvensional	Persentase	68,22	68,22*	68,22*	100
1.2	Indikator 1.2 Tingkat Literasi Keuangan Syariah	Persentase	47,73	47,73*	47,73*	100
II	<i>Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan	Persentase	85	40	40	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah	Persentase	85	40	40	100
III	<i>Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,76**	100

IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan	Persentase	92	40	40	100

Note: *angka target tahunan (Tingkat literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II sehingga hasil survey baru dapat diketahui pada akhir tahun)

**berdasarkan hasil survey pada TW II

Kinerja Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Literasi Keuangan Konvensional
2. Tingkat Literasi Keuangan Syariah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Tingkat Literasi Keuangan Konvensional

Latar Belakang

Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Literasi keuangan diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu (i) pengetahuan, (ii) keterampilan, (iii) keyakinan, (iv) sikap, dan (v) perilaku.

Untuk mengukur tingkat literasi keuangan konvensional dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 68,22%, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RPJMN 2025-2029. Dalam rangka pengukuran capaian Tingkat literasi keuangan konvensional akan diperoleh melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). SNLIK akan diumumkan pada Semester II Tahun 2026, sehingga hasil survei SNLIK baru dapat diketahui pada Akhir Tahun 2026, maka dari itu ketercapaian target pada Triwulan belum dapat diketahui, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Literasi Keuangan Konvensional	Persentase	68,22	68,22*	100

Note: *angka target tahunan (Tingkat literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II sehingga hasil survey baru dapat diketahui pada akhir tahun)

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga anggota DNKI, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri dan pemuda sebagaimana kelompok sasaran yang ditetapkan pada Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan yang turut melibatkan partisipasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), pemberdayaan hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi lembaga keuangan dengan *branchless office* dan digitalisasi keuangan, elektronifikasi program pemerintah bagi kelompok rentan dan pelaku UMK melalui program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan dan pelaksanaan *market conduct*, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan infrastruktur dasar dan teknologi informasi yang mendukung literasi keuangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Literasi Keuangan Konvensional			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan konvensional bagi segmen prioritas	Terlaksana	Rencana aksi telah dilaksanakan di TW II (rincian terlampir)
2.	Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan konvensional	Terlaksana	Rencana aksi telah dilaksanakan di TW II (rincian terlampir)

Rincian pelaksanaan Rencana Aksi triwulan II beserta hasil kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan konvensional bagi segmen prioritas
 - Rapat laporan pelaksanaan SNKI 2025 pada tanggal 1 April 2026.
 - Rapat Pembahasan Kajian J-PAL terkait laporan SNKI 2025 pada tanggal 6 April 2026.
 - Konsinyering Penyusunan Petunjuk Teknis TPAKD 2026-2030 pada tanggal 8-9 April 2026.
 - Rapat Penyusunan Laporan Pelaksanaan SNKI 2025 pada tanggal 9 April 2026
 - Rapat Update Agenda PINTAR pada tanggal 16 April 2026
 - Rapat Program kerjasama dengan BMGF terkait Pemberdayaan UMKM pada tanggal 28 April 2026.
 - Rapat Teknis Lanjutan Finalisasi Skor IKAD Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2026
 - Rapat Penyusunan Juknis TPAKD 2026-2030 pada tanggal 7 Mei 2026
 - Rapat Teknis Finalisasi Skor IKAD Tahun 2025 pada tanggal 26 Mei 2026.
 - Rapat Koordinasi Kerja Sama Pusat-Daerah dalam Kerangka TPAKD pada tanggal 4 Juni 2026.
 - Rapat Pembahasan Laporan SNKI 2025 pada tanggal 5 Juni 2026
 - Rapat Pembiayaan UMK mitra Pemerintah pada tanggal 17 Juni 2026.
 - Rapat Koordinasi Tim Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) pada tanggal 18 Juni 2026.
 - Rapat Koordinasi Pendalaman Data Proses IKAD pada tanggal 30 Juni 2026.
2. Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan konvensional
 - FGD inklusi Keuangan Usaha Ramah Lingkungan pada tanggal 8 April 2026.
 - Kick-off program Desa Berdaya di NTB pada tanggal 13-14 April 2026.
 - Monitoring Program Mekaar pada tanggal 22 April 2026.
 - Dialog Publik Penguatan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 28 April 2026
 - FGD Peluang Kerjasama Investasi Mendukung Inklusi Keuangan pada tanggal 5 Mei 2026
 - FGD tentang Peluang Kerjasama antara DNKI dengan Pergunu Dalam Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan pada tanggal 5 Mei 2026.
 - Tindak Lanjut Pilot Project Program PINTAR pada tanggal 20 Mei 2026.
 - Kunjungan Lapangan KPSP Setia Kawan pada tanggal 10 Juni 2026.
 - PROMISE 2 IMPACT, ILO Perihal: Peluncuran Sistem ERP dan Akses Keuangan Inklusif - Program PED di Sektor Sapi Perah, Jawa Timur pada tanggal 11 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilakukan secara daring atau *hybrid*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi

dalam mencapai target tersebut, yaitu Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara tingkat inklusi dan literasi keuangan dimana banyak masyarakat sudah memiliki produk keuangan misalnya rekening bank, tetapi belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengelola produk tersebut secara bijak. Begitupun dengan rendahnya literasi pada sektor non-bank. Literasi masyarakat masih didominasi oleh produk perbankan sehingga masyarakat gagal memanfaatkan produk non-bank untuk proteksi (asuransi) dan pengembangan aset (pasar modal), sehingga ketahanan finansial jangka panjang rumah tangga menjadi rapuh. Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup jelas juga antara inklusi keuangan di perkotaan dengan perdesaan. Masyarakat di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti perbankan dan pembiayaan, sementara masyarakat di perdesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan akses. Selanjutnya, lemahnya sinergi program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan bagi kelompok sasaran; inisiatif program yang secara spesifik menyasar kepada masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan lokal, serta penguatan DNKK menjadi DNKK.

1.2 Tingkat Literasi Keuangan Syariah

Latar Belakang

Literasi keuangan syariah adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan syariah untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 47,73%, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RPJMN 2025-2029. Dalam rangka pengukuran capaian tingkat literasi keuangan syariah akan diperoleh melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaksanaan SNLIK baru dilakukan pada Semester II Tahun 2026, sehingga hasil survei SNLIK baru dapat diketahui pada Akhir Tahun 2026, maka dari itu ketercapaian target pada Triwulan belum dapat diketahui, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Tingkat Literasi Keuangan Syariah	Persentase	47,73	47,73*	100

Note: *angka target tahunan (Tingkat literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II sehingga hasil survey baru dapat diketahui pada akhir tahun)

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga anggota DNKI, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri dan pemuda sebagaimana kelompok sasaran yang ditetapkan pada Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan syariah yang turut melibatkan partisipasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), pemberdayaan hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi lembaga keuangan syariah dengan *branchless office* dan digitalisasi keuangan syariah, elektronifikasi program pemerintah bagi kelompok rentan dan pelaku UMK melalui program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan syariah dan pelaksanaan *market conduct*, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan infrastruktur dasar dan teknologi informasi yang mendukung literasi keuangan syariah.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Tingkat Literasi Keuangan Syariah			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan syariah bagi segmen prioritas	Terlaksana	Rencana aksi telah dilaksanakan di TW II (rincian terlampir)
2.	Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan syariah	Terlaksana	Rencana aksi telah dilaksanakan di TW II (rincian terlampir)

Rincian pelaksanaan Rencana Aksi triwulan II beserta hasil kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan syariah bagi segmen prioritas
 - Rapat Koordinasi Kegiatan Keuangan Syariah dengan Pegadaian Syariah pada tanggal 7 April 2026.
 - Rapat persiapan Sosialisasi Syariah Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada tanggal 10 April 2026.

- Rapat Koordinasi Kegiatan Sosialisasi UAD pada tanggal 17 April 2026.
 - Rapat Koordinasi Penguatan Kemitraan Pemberdayaan UMKM melalui Inklusi Keuangan dan Rapat Persiapan Sosialisasi dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro bagi Anggota Credit Union Se-Keuskupan Agung Jakarta pada tanggal 19 Mei 2026.
 - Audiensi Bidang EKSYAR Kedeputan II KSP dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada tanggal 22 Juni 2026.
2. Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan syariah
- FGD Pemberdayaan bagi UMK Aisyiah pada tanggal 20 April 2026.
 - Edukasi Keuangan Syariah Bagi Warga Muhammadiyah Tahun 2026 pada tanggal 22 April 2026.
 - FGD peran perguruan tinggi dalam mendukung inklusi keuangan dan keuangan syariah pada tanggal 29 April 2026.
 - Training of Trainer Calon Pendamping Produk Halal Dalam Rangka Tindaklanjut Program Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Inklusif Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro Binaan Sentra Bimbingan Usaha Kecil (SABUK) Keuskupan Agung Jakarta pada tanggal 29 April 2026.
 - Focus Group Discussion (FGD) tentang Peluang Kerjasama antara DNKI dengan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Dalam Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
 - FGD Update Perkembangan Keuangan Syariah Global pada tanggal 8 Mei 2026
 - FGD dan Sosialisasi Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Ultra Mikro SABUK KAJ pada tanggal 23 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilakukan secara daring atau *hybrid*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara tingkat inklusi dan literasi keuangan dimana banyak masyarakat sudah memiliki produk keuangan misalnya rekening bank, tetapi belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengelola produk tersebut secara bijak. Begitupun dengan rendahnya literasi pada sektor non-bank. Literasi masyarakat masih didominasi oleh produk perbankan sehingga masyarakat gagal memanfaatkan produk non-bank untuk proteksi (asuransi) dan pengembangan aset (pasar modal), sehingga ketahanan finansial jangka panjang rumah tangga menjadi rapuh. Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup jelas juga antara inklusi keuangan di perkotaan dengan perdesaan. Masyarakat di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti perbankan dan pembiayaan, sementara masyarakat di perdesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan akses. Selanjutnya, lemahnya sinergi program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan bagi kelompok sasaran; inisiatif

program yang secara spesifik menysasar kepada masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan lokal; serta penguatan DNKI menjadi DNKK.

2

Sasaran Kegiatan 2. *Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas*

Pencapaian Sasaran Strategis 2: *Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas* yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Peningkatan Inklusi keuangan diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Untuk mengukur Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan dilakukan melalui perhitungan realisasi tahapan pertama, yaitu nilai tahapan pertama = (jumlah dokumen yang dihasilkan/jumlah dokumen yang ditargetkan) * 40%.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan sebesar 85%, penetapan target tahun 2026 tersebut didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Tahun 2026. Secara umum Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan hingga Triwulan II Tahun 2026, berjalan sesuai *timeline* yang ditetapkan. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 47,06% dari target tahun 2026 serta 100% dari target Triwulan II 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan	Persentase	85	40	100

Dalam rangka peningkatan inklusi dan literasi keuangan, sebagaimana amanat UU P2SK Pasal 226, dan menindaklanjuti arahan presiden bahwa literasi dan inklusi keuangan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pemanfaatannya untuk memenuhi kewajiban keuangan dan kebutuhan sehari-hari, memiliki ketahanan terhadap guncangan keuangan, mewujudkan tujuan keuangan, serta memiliki kepercayaan diri, rasa aman, dan kendali terhadap kondisi keuangannya agar dibetuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai penguatan kelembagaan DNKI.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Identifikasi permasalahan terkait: - Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital - Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen, - Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil - Penyusunan regulasi terkait peningkatan	Terlaksana	Rencana aksi telah dilaksanakan di TW II (rincian terlampir)

	inklusi dan literasi keuangan		
--	-------------------------------	--	--

Rincian pelaksanaan Rencana Aksi triwulan II beserta hasil kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bilateral Meeting dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum terkait RPP DNKK pada tanggal 28 April 2026.
2. FGD Pembentukan Kelembagaan Kesejahteraan Keuangan pada tanggal 29 April 2026.
3. Rapat Persiapan penyusunan Keppres dan Perpres DNKK pada tanggal 5 Mei 2026.
4. Rapat penyusunan Perpres & Keppres DNKK pada tanggal 7 Mei 2026.
5. Rapat penyusunan Perpres & Keppres DNKK pada tanggal 12 Mei 2026.
6. Rapat penyusunan Perpres & Keppres DNKK pada tanggal 13 Mei 2026.
7. Rapat Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 26 Mei 2026.
8. Rapat Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 29 Mei 2026.
9. Rapat Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 2 Juni 2026.
10. Rapat Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 9 Juni 2026.
11. Rapat Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 19 Juni 2026.
12. Rapat Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 26 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilakukan secara daring atau *hybrid*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bahwa untuk dibentuk komite nasional peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Namun, berdasarkan arahan presiden agar dibentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai penguatan kelembagaan DNKI. Hal ini dimaksudkan bahwa literasi dan inklusi keuangan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pemanfaatannya untuk memenuhi kewajiban keuangan dan kebutuhan sehari-hari, memiliki ketahanan terhadap guncangan keuangan, mewujudkan tujuan keuangan, serta memiliki kepercayaan diri, rasa aman, dan kendali terhadap kondisi keuangannya. Hal ini berdampak pada proses penyusunan regulasi yang awalnya RPP Komnas LIK berubah menjadi DNKK.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan sosialisasi kepada para stakeholder terkait perubahan regulasi yang awalnya RPP Komnas LIK berubah menjadi DNKK.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah. Proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Peningkatan Inklusi keuangan diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah sebesar 85%, penetapan target tahun 2026 tersebut didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Tahun 2026. Secara umum Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah hingga Triwulan II Tahun 2026, berjalan sesuai *timeline* yang ditetapkan. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 47,06% dari target tahun 2026 serta 100% dari target Triwulan II 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah	Persentase	85	40	100

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, dan Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang tangguh dan kompetitif. Pemerintah dalam hal ini Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI), dan regulator perlu memberikan arah kebijakan yang jelas dan kondusif. Lembaga keuangan syariah harus terus berinovasi, memperkuat tata kelola, serta menyediakan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, peran akademisi dan komunitas menjadi penting dalam menyebarkan literasi dan edukasi keuangan syariah secara lebih masif.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Identifikasi permasalahan terkait: - Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital - Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen, - Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil - Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan	Terlaksana	Rencana aksi telah dilaksanakan di TW II (rincian terlampir)

Rincian pelaksanaan Rencana Aksi triwulan II beserta hasil kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bilateral Meeting dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum terkait RPP DNKK pada tanggal 28 April 2026.
2. FGD Pembentukan Kelembagaan Kesejahteraan Keuangan pada tanggal 29 April 2026.
3. Rapat Persiapan penyusunan Keppres dan Perpres DNKK pada tanggal 5 Mei 2026.
4. Rapat penyusunan Perpres & Keppres DNKK pada tanggal 7 Mei 2026.
5. Rapat penyusunan Perpres & Keppres DNKK pada tanggal 12 Mei 2026.
6. Rapat penyusunan Perpres & Keppres DNKK pada tanggal 13 Mei 2026.
7. Rapat Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 26 Mei 2026.
8. Rapat Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 29 Mei 2026.
9. Rapat Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 2 Juni 2026.
10. Rapat Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 9 Juni 2026.
11. Rapat Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 19 Juni 2026.
12. Rapat Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 26 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilakukan secara daring atau *hybrid*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bahwa untuk dibentuk komite nasional peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan, termasuk keuangan syariah. Namun, berdasarkan arahan presiden agar dibentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai penguatan kelembagaan DNKI. Hal ini dimaksudkan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga pada peningkatan kualitas pemanfaatannya untuk memenuhi kewajiban keuangan dan kebutuhan sehari-hari, memiliki ketahanan terhadap guncangan keuangan, mewujudkan tujuan keuangan, serta memiliki kepercayaan diri, rasa aman, dan kendali terhadap kondisi keuangannya. Hal ini berdampak pada proses penyusunan regulasi yang awalnya RPP Komnas LIK berubah menjadi DNKK.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan sosialisasi kepada para stakeholder terkait perubahan regulasi yang awalnya RPP Komnas LIK berubah menjadi DNKK.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri dari 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan

dengan menggunakan Google Form. Adapun pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas tahun 2026 dilakukan dengan survei kepuasan layanan yang dilakukan tiap semesternya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 berupa skala sebesar 3 dari 4 (baik), penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil survei yang telah dilakukan kepada para Kementerian/Lembaga/Mitra terkait.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan belum dapat diketahui realisasi kinerjanya karena penilaian dilakukan setiap 6 bulan sekali dan baru dapat diketahui pada akhir triwulan II dan triwulan IV. Namun jika dilihat dari pelaksanaan atas rencana aksi pada triwulan II 2026, dapat dikatakan seluruh kegiatan dalam rencana aksi perjanjian kinerja telah terealisasi seluruhnya atau sebesar 100% dari target triwulan II dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Indeks	3 dari 4	3,76*	100%

*) Angka target semesteran (Indeks diperoleh melalui survei yang dilakukan tiap semesternya sehingga hasil survey baru dapat diketahui pada akhir triwulan II)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Terpenuhinya seluruh layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada stakeholder demi terciptanya kebijakan yang berkualitas	Terlaksana	Telah dilakukan serangkaian persiapan dalam mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian yang akan dilaksanakan pada triwulan II 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Adapun target Triwulan II 2026 adalah sebesar 40% dengan target capaian telah tersusunnya beberapa dokumen terkait perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan implementasi Srikandi.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 43,48% dari target Tahun 2026 sebesar 92% target Tahun 2026 sebesar dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas	Persentase	92	40	100%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan pada Triwulan II 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sesuai dengan Kertas Kerja Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi yang telah ditetapkan. Adapun telah dilakukan serangkaian kegiatan yang mendukung pencapaian Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas dengan hasil sebagai berikut:

1. Telah terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, antara lain Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan Manual IKU level eselon II.
2. Telah terselesaikannya penyusunan dokumen laporan kinerja triwulanan level eselon II melalui Ekon-Go.
3. Telah dilakukan penyampaian data monitoring capaian Rincian Output Prioritas Nasional triwulanan.
4. Telah dilakukan optimalisasi penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan.

Sampai dengan akhir triwulan II Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada triwulan II, Persentase

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi diproyeksikan dapat tercapai di akhir triwulan IV 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan	Terlaksana	Telah dilakukan pengelolaan data kinerja melalui Ekon-Go
2.	Penyusunan Renja 2026	terlaksana	Telah dilakukan penyusunan Renja 2026
3.	Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional setiap tahun 2026	Terlaksana	Telah dilakukan monitoring capaian kinerja secara berkala sesuai target yang telah ditetapkan
4.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilakukan monitoring implementasi penggunaan Srikandi dalam persuratan di unit keasdepan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan.

Jakarta, 30 Juni 2026

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan



ERDIRIYO